



PERCEPATAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEUANGAN DAERAH

Pembayaran Retribusi dan Pajak Diupayakan Nontunai

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan terus mengupayakan agar pembayaran pajak dan retribusi daerah oleh masyarakat secara nontunai. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, upaya tersebut juga menjadi bagian dari percepatan implementasi digitalisasi keuangan daerah.

Asisten Administrasi Umum sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengatakan saat ini Pemkot Yogya telah memiliki layanan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai dengan Quick Response Code Indonesian Standard Dinamis (QRISNA). Layanan itu sudah terintegrasi melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

"Saat ini QRISNA dapat digunakan masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, pembayaran pajak hotel dan resto, pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, pajak air tanah dan beberapa layanan pembayaran pajak lainnya," paparnya, Kamis (25/4).

Menurutnya, inovasi QRISNA tengah dikembangkan untuk dapat digunakan dalam layanan pembayaran retribusi daerah. Seperti pembayaran retribusi pasar, pelayanan persampahan dan kebersihan, rumah potong hewan, pelayanan kese-

hatan hewan dan pembayaran retribusi lainnya. Dalam pengembangannya, Pemkot Yogya berkolaborasi dengan PT Bank BPD DIY selaku pemegang kas daerah.

Pimpinan Cabang Senopati Bank BPD DIY Gunawan Hasri Baskoro, menyampaikan salah satu unsur utama dari digitalisasi adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan prinsip bagaimana transaksi yang semula pola pengelolaannya tunai menjadi nontunai.

"Kami tentunya bersama Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan mendukung digitalisasi sistem pengelolaan belanja dan anggaran Pemkot Yogya. Beserta juga layanan publiknya agar proses dapat berjalan lebih cepat. Dengan tetap memprioritaskan akuntabilitas pencatatan dan tata kelola keuangan pemerintah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku," terangnya.

Pihaknya juga menyatakan sekarang ini tengah melakukan pengembangan fitur guna mendukung percepatan digitalisasi keuangan daerah dan pelayanan publik agar se-

makin efektif dan efisien.

Sejalan dengan itu Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Joko Marwiyanto, menjelaskan pengembangan pembayaran retribusi tengah digarap bersamaan dengan pengembangan fitur Virtual Account (VA) untuk pembayaran pajak.

"Saat ini kami sedang mengembangkan QRIS Dinamis untuk pembayaran retribusi. Jadi nantinya ketika barcode dipindai muncul secara otomatis berapa nominal yang harus dibayarkan dan bisa support seluruh m-banking dan e-wallet. Sementara itu kami juga akan kembangkan fitur VA dalam pembayaran pajak untuk mengakomodir seluruh wajib pajak, karena ketika menggunakan QRIS Dinamis ada batasan nominal transaksi Rp 10 juta," jelasnya.

Menurutnya terkait pengembangan ekosistem digital pada dasarnya juga harus melibatkan peran agen perubahan di masyarakat yang membiasakan diri untuk bertindak dan beraku secara digital. Seperti halnya seluruh pegawai Pemkot sebagai pelayan publik yang dapat menjadi contoh langsung dalam bertindak secara digital di kehidupan sehari-hari. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005